



BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA

NOMOR : 47 TAHUN 2017

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 dan Pasal 71 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 66 / PMK.02 /2006 tentang Tatacara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 90).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Lampung Utara ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Organisasi Perangkat

Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-OPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan PPK-BLUD.
9. Unit Kerja pada OPD yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja pada OPD di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan PPK-BLUD.
10. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
11. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
12. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
13. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
14. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
15. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh Pimpinan BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.

16. Laporan keuangan hasil konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai suatu entitas pelaporan.
17. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA-BLUD adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang antara lain berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD.
18. Rencana Bisnis Anggaran Definitif yang selanjutnya disingkat RBA Definitif adalah dokumen RBA yang telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang APBD.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
20. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, dan arah kebijakan operasional BLUD.
21. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat.

BAB II

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Penyusunan

Pasal 2

- (1) BLUD-OPD wajib menyusun rencana strategi bisnis lima tahunan dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Lampung Utara.
- (2) BLUD Unit Kerja wajib menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan berpedoman kepada Rencana Strategis OPD.
- (3) BLUD menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis dan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan:
 - a. basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan; dan
 - b. kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima.
- (5) Kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri dari:
 - a. pendapatan yang akan diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;

- b. hibah yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. penerimaan anggaran yang bersumber dari APBD;
- e. penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN; dan
- f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 3

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a, yaitu berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat berdasarkan tarif layanan *unit cost* dan mutu layanan.
- (2) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c, yaitu berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan perbiayaan APBD.
- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.
- (5) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf f, antara lain:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - g. hasil investasi; dan
 - h. hasil divestasi.

Pasal 4

- (1) Biaya BLUD merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.

- (5) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari:
- a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (6) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (7) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (8) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terdiri dari:
- a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (9) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), terdiri dari:
- a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi; dan
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.
- (10) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
- a. biaya bunga;
 - b. biaya administrasi bank;
 - c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
 - d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
 - e. Biaya non operasional lain-lain.

Pasal 5

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel (*flexible budget*) dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (2) Pola anggaran fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk belanja yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a, b dan huruf c.
- (3) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan peningkatan nilai pendapatan yang diperoleh pada tahun berjalan, dibandingkan dengan pendapatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku apabila pendapatan operasional BLUD melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA tahun yang diusulkan.

- (5) Pengeluaran di atas anggaran yang ditetapkan dalam RBA tetapi masih dibawah besaran ambang batas dilaporkan kepada PPKD.
- (6) Pengeluaran di atas anggaran yang ditetapkan dalam RBA dan melampaui besaran ambang batas, wajib mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 6

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) memuat:
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. analisa, target, kinerja yang terukur;
 - d. perkiraan pendapatan berdasarkan pelayanan dan pendukung pelayanan;
 - e. perkiraan biaya berdasarkan pelayanan dan pendukung pelayanan;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya/ pengeluaran; -
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. prognosa dan proyeksi laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju (*forward estimate*); dan
 - j. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan, standar pelayanan minimal dan standar biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.
- (3) Format RBA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Harga satuan yang digunakan dalam menyusun RBA berpedoman kepada harga satuan barang dan jasa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengajuan

Pasal 8

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) untuk BLUD-OPD disusun dan ditetapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) untuk ELUD-Unit Kerja, disusun dan ditetapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RKA-OPD.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dipersamakan sebagai Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Pasal 9

- (1) Pimpinan BLUD mengajukan RBA kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dilakukan penelaahan.

- (2) Penelaahan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pembahasan terutama mencakup standar biaya dan anggaran BLUD, kinerja keuangan BLUD serta besaran persentase ambang batas.
- (3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.

Pasal 10

- (1) BLUD melakukan konversi atas RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ke dalam format RKA-OPD atau format APBD, yang terbatas pada jenis belanja setelah dieliminasi (dikeluarkan) unsur-unsur akrualnya.
- (2) RBA yang telah dikonsolidasikan ke dalam format RKA-OPD atau format APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kembali kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Ketiga Penetapan

Pasal 11

- (1) Hasil penelaahan atas RBA yang telah dikonversi ke dalam format RKA-OPD atau format APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), menjadi dasar dalam rangka pemrosesan RKA-OPD sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBD.
- (2) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, pimpinan BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA Definitif.
- (3) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar penyusunan DPA-BLUD untuk diajukan kepada PPKD.

BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu Penyusunan

Pasal 12

- (1) DPA-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) memuat seluruh pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan, rencana penarikan dana yang bersumber dari APBD, serta besaran persentase ambang batas sebagaimana ditetapkan dalam RBA definitif.
- (2) Format DPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) DPA-BLUD OPD disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk disetujui oleh PPKD dan Sekretaris Daerah, serta disahkan oleh Bupati.
- (2) DPA-BLUD Unit Kerja yang rnenjadi bagian dari DPA-OPD disampaikan oleh Kepala OPD kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk disetujui oleh PPKD dan Sekretaris Daerah, serta disahkan oleh Bupati.
- (3) DPA-BLUD yang telah disetujui oleh PPKD dan Sekretaris Daerah, serta disahkan oleh Bupati menjadi dasar pelaksanaan anggaran dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum disahkan oleh Bupati, OPD/Unit Kerja BLUD dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka dalam DPA-BLUD tahun anggaran sebelumnya.

Bagian Kedua 4 Penarikan dan Penggunaan Dana

Pasal 14

DPA-BLUD yang telah disahkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah tidak terikat, serta hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau lain-lain pendapatan BLUD yang sah dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran operasional BLUD sesuai dengan DPA-BLUD.
- (2) Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain harus digunakan sesuai dengan peruntukan yang disepakati dengan pemberi hibah.

Pasal 16

- (1) DPA-BLUD menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan pemimpin BLUD.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan manifestasi hubungan kerja antara Bupati dan pemimpin BLUD, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (*contractual/performance agreement*).
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan pemimpin BLUD untuk rnenyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA-BLUD.

- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

BAB IV
PERGESERAN YANG BOLEH DILAKUKAN
OLEH BLUD OPD DAN BLUD UNIT KERJA OPD

Pasal 17

- (1) Pergeseran anggaran pada program, kegiatan, dan jenis biaya dilakukan dengan mengajukan rencana perubahan anggaran kepada Bupati sesuai mekanisme perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran pada obyek biaya dilakukan oleh pemimpin BLUD dan disahkan oleh PPKD.
- (3) Pergeseran anggaran pada rincian obyek biaya dilakukan oleh pemimpin BLUD.
- (4) Pergeseran anggaran pada obyek biaya dilakukan dengan persetujuan Kepala OPD atas usulan Pemimpin Unit Kerja BLUD dan disahkan oleh PPKD.
- (5) Pergeseran anggaran pada rincian obyek biaya dilakukan pemimpin Unit Kerja BLUD dengan persetujuan Kepala OPD.

BAB V
SURPLUS DAN DEFISIT

Pasal 18

- (1) Surplus anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus Anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
- (4) Defisit anggaran BLUD dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh PPKD dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

NO	PERORANG/KEORGANISASI
1.	WALIKOTA
2.	WAKIL WALIKOTA
3.	WAKIL BUPATI LAMPUNG UTARA
4.	WAKIL BUPATI LAMPUNG UTARA
5.	WAKIL BUPATI LAMPUNG UTARA
6.	WAKIL BUPATI LAMPUNG UTARA
7.	PLT DIR. RSD RYACUDU

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 17 - 10 - 2017

BUPATI LAMPUNG UTARA,

AGUNG ILMU MANGKUNEGARA

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 17 - 10 - 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**

SAMSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2017 NOMOR 47

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA

NOMOR : 47 2017

TANGGAL : 17-10-2017

**TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN
ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
(RBA-BLUD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

I. PENDAHULUAN

1.1. Latarbelakang

Dalam rangka implementasi pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Unit OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Rencana Bisnis Anggaran (RBA) merupakan salah satu dokumen yang menunjang keberhasilan dalam penerapan PPK BLUD yang wajib disusun berdasarkan Rencana Strategi Bisnis yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan penerapan PPK-BLUD Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005' sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, namun dalam implementasinya, belum berjalan secara optimal. Penyebab belum optimalnya implementasi PPK-BLUD tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) tingkat pemahaman yang beragam terkait dengan implementasi PPK-BLUD; (2) keterbatasan kompetensi sumberdaya manusia dalam implementasi PPK-BLUD; dan (3) masih kurangnya perangkat pendukung yang dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi PPK-BLUD di daerah.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara secara bertahap akan menyusun perangkat pendukung yang dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi PPK-BLUD di Kabupaten Lampung Utara, salah satunya adalah Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) sebagai dokumen anggaran tahunan yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Bisnis BLUD.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mendukung keberhasilan penerapan PPK-BLUD di Kabupaten Lampung Utara, dipandang perlu untuk menerbitkan Peraturan tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD di Kabupaten Lampung Utara yang dapat menjadi acuan bagi satuan kerja dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam menyusun RBA dan DPA-BLUD, sebagai dasar dalam pengelolaan keuangan BLUD.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Pedoman Penyusunan RBA-BLUD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara ini adalah untuk menjadi acuan dalam menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dengan RAPBD serta Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD atau dengan RKA OPD.

II. FORMAT RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BLUD

HALAMAN SAMPUL
KATA PENGANTAR
RINGKASAN EKSEKUTIF
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas.....

BAB II KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN (20XX)..

- A. Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja
- 1. Faktor Internal
- 2. Faktor Eksternal
- B. Perbandingan Asumsi pada Waktu Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran dengan Fakta yang Terjadi
- 1. Aspek Makro
- 2. Aspek Mikro
- C. Pencapaian Kinerja
- 1. Non Keuangan, Kegiatan Berdasarkan Unit Layanan
- 2. Keuangan
- a. Realisasi Pendapatan Berdasarkan Unit Layanan.....
- b. Realisasi Biaya Berdasarkan Unit Layanan
- c. Realisasi Biaya
- d. Realisasi Investasi
- e. Realisasi Pendanaan
- D. Prognosa Laporan Keuangan
- 1. Neraca
- 2. Laporan Operasional
- 3. Laporan Arus Kas
- 4. Catatan atas Laporan Keuangan

BAB III RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN (20XX+1).....

- A. Kondisi Lingkungan yang Diprediksi akan Mempengaruhi Pencapaian Kinerja
- 1. Faktor Internal
- 2. Faktor Eksternal
- B. Asumsi yang Digunakan
- 1. Aspek Makro
- 2. Aspek Mikro
- C. Sasaran, Indikator, Target Kinerja, dan Kegiatan Berdasarkan Unit Layanan
- D. Program Kerja dan Kegiatan
- 1. Program Kerja
- 2. Kegiatan Pelayanan.....
- E. Perkiraan Pendapatan.....

F. Perkiraan Biaya.....
1. Biaya Berdasarkan Unit Layanan
2. Total Biaya Operasional dan Non Operasional.....
G. Perkiraan Penerimaan dan Pengeluaran Investasi.....
1. Penerimaan dan Pengeluaran Investasi untuk Unit Layanan.....
2. Total Penerimaan dan Pengeluaran Investasi untuk Unit Layanan.....
H. Perkiraan Penerimaan dan Pengeluaran Pendanaan.....
1. Penerimaan Pendanaan.....
2. Pengeluaran Pendanaan.....
I. Anggaran Badan Layanan Umum Daerah.....
1. Anggaran Pendapatan (Basis Akrual).....
2. Anggaran Biaya (Basis Akrual).....
3. Anggaran Pendapatan BLUD (Basis Kas).....
4. Anggaran Belanja BLUD (Basis Kas).....
5. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Investasi.....
6. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pendanaan.....
J. Ambang Batas Rencana Bisnis dan Anggaran.....
BAB IV PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN (20XX+1)
A. Proyeksi Neraca.....
B. Proyeksi Laporan Operasional.....
C. Proyeksi Laporan Arus Kas.....
D. Catatan atas Proyeksi Laporan Keuangan.....
BAB V PENUTUP.....
A. Kesimpulan.....
B. Hal-hal yang Perlu Mendapat Perhatian.....
LAMPIRAN.....

III. PENJELASAN

HALAMAN SAMPUL

PEMERINTAH
PROVINSI / KABUPATEN / KOTA¹
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH²

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN (20XX)³

¹ Diisi nama pemerintah daerah yang bersangkutan

² Diisi nama SKPD/Unit Kerja yang menerapkan PPK-BLUD

³ Diisi tahun anggaran yang dianggarkan

KATA PENGANTAR

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....,..... 20XX

Pemimpin BLUD

(.....)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
KATA PENGANTAR	
RINGKASAN EKSEKUTIF	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum	
B. Maksud dan Tujuan	
C. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas.....	
BAB II KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN (20XX)⁴	
A. Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja	
1. Faktor Internal	
2. Faktor Eksternal	
B. Perbandingan Asumsi pada Waktu Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran dengan Fakta yang Terjadi	
1. Aspek Makro	
2. Aspek Mikro	
C. Pencapaian Kinerja	
1. Non Keuangan, Kegiatan Berdasarkan Unit Layanan	
2. Keuangan ⁵	
a. Realisasi Pendapatan Berdasarkan Unit Layanan.....	
b. Realisasi Biaya Berdasarkan Unit Layanan ⁶	
c. Realisasi Biaya	
d. Realisasi Investasi	
e. Realisasi Pendanaan	
D. Prognosa Laporan Keuangan	
1. Neraca	
2. Laporan Operasional	
3. Laporan Arus Kas	
4. Catatan atas Laporan Keuangan	
BAB III RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN (20XX+1)⁷	
A. Kondisi Lingkungan yang Diprediksi akan Mempengaruhi Pencapaian Kinerja	
1. Faktor Internal	
2. Faktor Eksternal	
B. Asumsi yang Digunakan	
1. Aspek Makro	
2. Aspek Mikro	
C. Sasaran, Indikator, Target Kinerja, dan Kegiatan Berdasarkan Unit Layanan.....	

⁴ Diisi TA berjalan

⁵ Menyangkut masalah realisasi anggaran BLUD

⁶ Opsional

⁷ Diisi TA yang dianggarkan

D. Program Kerja dan Kegiatan	
1. Program Kerja	
2. Kegiatan Pelayanan.....	
E. Perkiraan Pendapatan.....	
F. Perkiraan Biaya.....	
1. Biaya Berdasarkan Unit Layanan ⁸	
2. Total Biaya Operasional dan Non Operasional.....	
G. Perkiraan Penerimaan dan Pengeluaran Investasi.....	
1. Penerimaan dan Pengeluaran Investasi untuk Unit Layanan.....	
2. Total Penerimaan dan Pengeluaran Investasi untuk Unit Layanan.....	
H. Perkiraan Penerimaan dan Pengeluaran Pendanaan.....	
1. Penerimaan Pendanaan.....	
2. Pengeluaran Pendanaan.....	
I. Anggaran Badan Layanan Umum Daerah.....	
1. Anggaran Pendapatan (Basis Akrual).....	
2. Anggaran Biaya (Basis Akrual).....	
3. Anggaran Pendapatan BLUD (Basis Kas).....	
4. Anggaran Belanja BLUD (Basis Kas).....	
5. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Investasi.....	
6. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pendanaan.....	
J. Ambang Batas Rencana Bisnis dan Anggaran.....	
BAB IV PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN (20XX+1)⁹.....	
A. Proyeksi Neraca.....	
B. Proyeksi Laporan Operasional.....	
C. Proyeksi Laporan Arus Kas.....	
D. Catatan atas Proyeksi Laporan Keuangan.....	
BAB V PENUTUP.....	
A. Hal-hal yang Perlu Mendapat Perhatian dalam Rangka Melaksanakan Badan Layanan Umum Daerah.....	
B. Kesimpulan.....	
LAMPIRAN.....	

⁸ Opsional

⁹ Diisi TA yang dianggarkan

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Gambaran Umum

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

B. Maksud dan Tujuan

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

C. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

BAB II
KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 20XX¹⁰

A. Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja

1. Faktor Internal

.....

2. Faktor Eksternal

.....

B. Perbandingan Asumsi pada Waktu Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran dengan Fakta yang Terjadi

1. Aspek Makro

No	Unsur	Asumsi TA 20XX	Fakta TA 20XX	Ket
1	2	3	4	5
1	Pertumbuhan ekonomi (%)			
2	Tingkat inflasi (%)			
3	Pertumbuhan pasar (%)			
4	Tingkat suku bunga pinjaman (%)			
5	Kurs (%)			
6	Dst			

Catatan :

Uraian di atas dapat mengacu pada indikator ekonomi setempat

Uraian :

.....

2. Aspek Mikro

No	Unsur	Asumsi TA 20XX	Fakta TA 20XX	Ket
1	2	3	4	5
1	Pembiayaan pelayanan publik sebagai fungsi <i>Public Service Obligation (PSO)</i>			
2	Kenaikan tarif layanan			
3	Pengembangan/peningkatan layanan			
4	Asumsi berkaitan dengan analisis rasio keuangan			
5	Dst			

Uraian :

.....

¹⁰ Diisi TA berjalan

C. Pencapaian Kinerja

1. Non Keuangan Berdasarkan Unit Layanan

No	Jenis Layanan	Satuan	Target Kinerja TA 20XX	Realisasi s.d 30 Juni 20XX	Prognosa s.d 31 Desember 20XX	Pencapaian (%)
1	2	3	4	5	6	$7=6/4$
1					
2					
3					
4	Dst					

Uraian :

.....

Contoh/ Ilustrasi untuk Rumah Sakit

No	Jenis Layanan	Satuan	Target Kinerja TA 20XX	Realisasi s.d 30 Juni 20XX	Prognosa s.d 31 Desember 20XX	Pencapaian (%)
1	2	3	4	5	6	$7=6/4$
1	UGD	Kunjungan	500	300	560	111
2	Rawat Inap	Hari Perawatan	25000	10000	20000	80
3					
4	Dst					

2. Keuangan

a) Realisasi Pendapatan Berdasarkan Unit Layanan

No	Unit Layanan	Anggaran Tahun 20XX (Rp)	Realisasi s.d 30 Juni 20XX (Rp)	Prognosa s.d 31 Desember 20XX (Rp)	Pencapaian (%)
1	2	3	4	5	$6=4/3 \times 100$
1				
2				
3				
4	Dst				
	Jumlah				

Uraian :

.....

b) Realisasi Biaya Berdasarkan Unit Layanan¹¹

No	Unit Layanan	Anggaran Tahun 20XX (Rp)	Realisasi s.d 30 Juni 20XX (Rp)	Prognosa s.d 31 Desember 20XX (Rp)	Pencapaian (%)
1	2	3	4	5	$6=4/3 \times 100$
1				
2				
3				
4	Dst				
	Jumlah				

¹¹ opsional

Uraian :

.....

c) Realisasi Biaya

Komponen Biaya	Anggaran Thn 20XX	Realisasi s/d 30 Juni 20XX	Prognosa s/d 31 Des 20XX	Pencapaian	Ket
1	2	3	4	5=(4)/(2)	6
I. Biaya Operasional					
A. Biaya Pelayanan					
1. Biaya pegawai					
2. Biaya bahan ¹²					
3. Biaya jasa pelayanan					
4. Biaya pemeliharaan					
5. Biaya barang dan jasa					
6. Biaya depresiasi					
7. Biaya pelayanan lainnya					
B. Biaya Umum dan Administrasi					
1. Biaya pegawai					
2. Biaya administrasi kantor					
3. Biaya pemeliharaan					
4. Biaya barang dan jasa					
5. Biaya promosi					
6. Biaya depresiasi					
7. Biaya umum dan administrasi lainnya					
II. Biaya Non Operasional					
1. Biaya bunga					
2. Biaya administrasi bank					
3. Kerugian penjualan aset					
4. Kerugian penurunan nilai					
5. Biaya non operasional lainnya					
Jumlah Biaya (I+II)					

Uraian :

.....

¹² Termasuk harga pokok barang yang dijual

d) Realisasi Investasi

1) Penerimaan Investasi

No	Jenis Investasi	Anggaran Tahun 20XX(Rp)	Realisasi s.d 30 Juni 20XX (Rp)	Pencapaian (%)	Ket
1	2	3	4	5=(4)/(3)	6
1	Pelepasan aset				
a	Kendaraan				
b	Mesin				
c	Dst				
2	Pencairan invesrasi				
a	Pencairan deposito				
b	Penjualan surat berharga				
c	Dst				
	Jumlah				

Uraian :

.....

2) Pengeluaran Investasi

No	Jenis Investasi	Sumber Dana, Anggaran, dan Realisasi														Pencapaian (%)	Ket
		Jasa Iayanan		Hibah		Kerjasama		APBD		APBN		Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah		Jumlah			
		Anggaran Tahun 20XX	Realisasi s/d ...	Anggaran Tahun 20XX	Realisasi s/d ...	Anggaran Tahun 20XX	Realisasi s/d ...	Anggaran Tahun 20XX	Realisasi s/d ...	Anggaran Tahun 20XX	Realisasi s/d ...	Anggaran Tahun 20XX	Realisasi s/d ...				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Tanah																
2	Peralatan dan mesin																
3	Gedung dan bangunan																
4	Kendaraan																
5	Perlengkapan dan peralatan kantor																
6	Jalan, irigasi dan jaringan																
7	Aset sewa guna usaha																
8	Surat utang ⁴ dan surat modal ⁵																
9	Deposito jangka waktu dari 12 bulan																
10	System Informasi																
11	Dst																
	Jumlah																

Uraian :

.....

⁴ Contoh surat utang : SUN (Surat Utang Negara), pembelian obligasi, SBI (Sertifikat Bank Indonesia)

⁵ Contoh surat modal : Saham

e) Realisasi Pendanaan

1) Penerimaan Pendanaan

No	Jenis Pendanaan	Anggaran Tahun 20XX (Rp)	Realisasi s.d (Rp)	Pencapaian (%)	Ket
1	2	3	4	5=(4)/(3)	6
1	Penarikan Pinjaman dari....				
2	Dst				
	Jumlah				

Uraian :

.....

2) Pengeluaran Pendanaan

No	Jenis Pendanaan	Anggaran Tahun 20XX (Rp)	Realisasi s.d (Rp)	Pencapaian (%)	Ket
1	2	3	4	5=(4)/(3)	6
1	Pembayaran utang kepada				
2	Dst				
	Jumlah				

Uraian :

.....

D. Prognosa Laporan Keuangan

1. Neraca

NERACA
Prognosa Per 31 Desember 20XX

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Tahun 20XX			
	Anggaran Per 31 Desember (Rp)	Realisasi Per 30 Juni (Rp)	Prognosa Per 31 Desember (Rp)	Selisih
1	2	3	4	5 = (4)-(2)
I. ASET				
A. Aset Lancar				
1. Kas dan setara kas				
2. Investasi jangka pendek				
3. Piutang usaha				
4. Piutang lain-lain				
5. Persediaan				
6. Uang muka				
7. Pendapatan yang harus diterima				
8. Dst				
Jumlah Aset Lancar				
B. Investasi Jangka Panjang				
C. Aset Tetap				
1. Tanah				
2. Gedung dan bangunan				
3. Peralatan dan mesin				
4. Kendaraan				
5. Perlengkapan dan peralatan kantor				
6. Jalan, irigasi, dan jaringan				
7. Dst				
Jumlah Aset Tetap				
Akumulasi penyusutan				
Nilai buku aset tetap				
D. Aset Lain-lain				
1. Aset tak berwujud				
2. Konstruksi dalam pengerjaan				
3. Dst				
Jumlah Aset Lain-lain				
Jumlah Aset (A+B+C+D)				
II. KEWAJIBAN				
A. Kewajiban Jangka Pendek				
1. Utang usaha				
2. Utang pajak				
3. Biaya yang masih harus dibayar				
4. Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun				
5. Pendapatan yang diterima dimuka				
6. Dst				
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek				
B. Kewajiban Jangka Panjang				
1. Utang jangka panjang yang jatuh tempo lebih dari satu				

tahun				
2. Dst				
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang				
Jumlah Kewajiban (A+B)				
III. EKUITAS				
1. Ekuitas tidak terikat				
a. Ekuitas awal				
b. Surplus (Defisit) sampai dengan periode satu tahun lalu				
c. Surplus (Defisit) tahun berjalan				
2. Terikat permanen ⁶				
3. Terikat temporer ⁷				
4. Hibah ⁸				
5. Donasi				
6. Dst				
Jumlah Ekuitas				
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas (II+III)				

Uraian :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Laporan Operasional

LAPORAN OPERASIONAL Prognosa Periode Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 20XX

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Tahun 20XX			
	Anggaran (Rp)	Realisasi s/d Tgl 30 Juni (Rp)	Prognosa s/d 31 Desember (Rp)	Selisih
1	2	3	4	5=(4-2)
A. Pendapatan				
1. Jasa layanan				
2. Hibah				
3. Hasil kerjasama				
4. Pendapatan dari APBD				
5. Pendapatan dari APBN				

⁶ Diisi periode yang berakhir pada tanggal neraca

⁷ Diisi periode yang berakhir pada tanggal neraca

⁸ Diisi periode yang berakhir pada tanggal neraca

6. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah				
Jumlah Pendapatan (1+2+3+4+5+6)				
B. Biaya Operasional				
1. Biaya pelayanan				
2. Biaya umum dan administrasi				
Jumlah Biaya Operasional (1+2)				
Surplus (Defisit) setelah biaya operasional (A-B)				
C. Pendapatan Non Operasional				
D. Biaya Non Operasional				
Surplus (Defisit) sebelum pos keuntungan / kerugian				
Surplus (Defisit) sebelum pos-pos luar biasa				
1. Pendapatan dari kejadian luar biasa				
2. Biaya dari kejadian luar biasa				
Surplus (Defisit) bersih tahun 20XX				

Uraian :

.....

3. Laporan Arus Kas
a. Metode Langsung

LAPORAN ARUS KAS
Prognosa Periode Tahun Yang Berakhir
Tanggal 31 Desember 20XX

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Tahun 20XX			
	Anggaran (Rp)	Realisasi s/d Tgl 30 Juni (Rp)	Prognosa s/d 31 Desember (Rp)	Selisih
1	2	3	4	5=(4-2)
A. Arus Kas dari Aktivitas Operasional				
Arus Kas Masuk				
1. Jasa layanan				
2. Hibah				
3. Hasil kerjasama				
4. Pendapatan dari APBD				
5. Pendapatan dari APBN				
6. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah				
Arus Kas Keluar				
1. Biaya layanan				
2. Biaya umum dan administrasi				
3. Biaya lain-lain				

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional				
B. Arus Kas dari Aktivitas Investasi				
Arus Kas Masuk				
1. Hasil penjualan aset				
2. Hasil investasi				
3. Dst				
Arus Kas Keluar				
1. Perolehan aset				
2. Pembelian investasi				
3. Perolehan aset lainnya				
4. Dst				
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi				
C. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan				
Arus Kas Masuk				
1. Penerimaan pinjaman dari				
2. Dst				
Arus Kas Keluar				
1. Pembayaran pinjaman kepada..				
2. Dst				
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan				
Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih Kas dan Setara Kas Awal				
Kas dan Setara Kas Akhir				

b. Metode Tidak Langsung

LAPORAN ARUS KAS
Prognosa Periode Tahun Yang Berakhir
Tanggal 31 Desember 20XX

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Tahun 20XX			
	Anggaran (Rp)	Realisasi s/d Tgl 30 Juni (Rp)	Prognosa s/d 31 Desember (Rp)	Selisih
1	2	3	4	5=(4-2)
A. Arus Kas dari Aktivitas Operasional				
1. Surplus (Defisit) tahun berjalan				
2. Penyesuaian ke dasar kas				
a. Biaya penyusutan dan amortisasi				
b. Kerugian penurunan nilai				
c. Biaya bunga				
d. Dst				
3. Perubahan aset lancar				
a. Investasi jangka pendek				
b. Piutang usaha				
c. Piutang lain-lain				
d. Persediaan				
e. Uang muka				

f. Pendapatan yang masih harus diterima				
4. Perubahan kewajiban jangka pendek				
a. Utang usaha				
b. Utang pajak				
c. Biaya yang masih harus dibayar				
d. Utang jangka panjang yang jatuh dalam satu tahun				
e. Pendapatan yang diterima di muka				
f. Utang jangka pendek lainnya				
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional				
B. Arus Kas dari Aktivitas Investasi				
Arus Kas Masuk				
1. Hasil penjualan aset				
2. Hasil investasi				
3. Dst				
Arus Kas Keluar				
1. Perolehan aset				
2. Pembelian investasi				
3. Perolehan aset lainnya				
4. Dst				
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi				
C. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan				
Arus Kas Masuk				
1. Penerimaan pinjaman dari				
2. Dst				
Arus Kas Keluar				
1. Pembayaran pinjaman kepada				
2. Dst				
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan				
Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih Kas dan Setara Kas Awal				
Kas dan Setara Kas Akhir				

4. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Prognosa Periode Tahun Yang Berakhir
Tanggal 31 Desember 20XX**

a. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

Sebagai contoh untuk pos kas dan setara kas, dan piutang usaha.

1) Kas dan setara kas, terdiri dari :

Uraian	Anggaran Tahun 20XX	Realisasi s/d	Prognosa s/d 31 Desember 20XX	Selisih (%)
1	2	3	4	$5=(4-2)/2$
Kas di bendahara penerimaan				
Giro Bank				
Tabungan Bank				
Deposito Bank				
Jumlah				

2) Piutang usaha, terdiri dari :

Uraian	Anggaran Tahun 20XX	Realisasi s/d	Prognosa s/d 31 Desember 20XX	Selisih (%)
1	2	3	4	$5=(4-2)/2$
Piutang kepada				
Piutang kepada				
Jumlah				

3) Dst

b. Penjelasan Atas Informasi Lainnya

.....

BAB III
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN (20XX+1)

A. Kondisi Lingkungan yang diprediksi akan Mempengaruhi Pencapaian Kinerja

1. Faktor Internal

a. Kondisi Pelayanan

1) Kekuatan :

-
-
-
-

2) Kelemahan :

-
-
-
-

b. Kondisi keuangan

1) Kekuatan :

-
-
-
-

2) Kelemahan :

-
-
-
-

c. Kondisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1) Kekuatan :

-
-
-
-

2) Kelemahan :

-
-
-
-

d. Kondisi Sarana dan Prasarana

1) Kekuatan :

-
-
-
-

2) Kelemahan :

-
-
-
-

2. Faktor Eksternal

- a. Peraturan perundang-undangan yang terkait
.....
.....
.....
- b. Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah tentang pembiayaan pelayanan publik sebagai fungsi *public Service Obligation* (SPO)
.....
.....
.....
- c. Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah tentang Sumber Daya Manusia (SDM)
.....
.....
.....
- d. Perkembangan social budaya dan tingkat pendidikan masyarakat
.....
.....
.....
- e. Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi
.....
.....
.....
- f. Keadaan persaingan dengan lembaga pelayanan yang sejenis
.....
.....
.....
- g. Keadaan perekonomian baik nasional maupun internasional
.....
.....
.....

B. Asumsi yang digunakan

1. Aspek Makro

No	Indikator Ekonomi	Asumsi TA 20XX+1
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	
2	Tingkat Inflasi (%)	
3	Pertumbuhan pasar (%)	
4	Tingkat suku bunga pinjaman (%)	
5	Kurs (Rp)	
6	Dst	

Catatan :

Uraian di atas diisi dengan kondisi BLUD dan indikator ekonomi daerah setempat

2. Aspek Mikro

No	Uraian	Asumsi TA 20XX+1
1	Pembiayaan dari pemerintah daerah sebagai fungsi <i>Public Service Obligation (SPO)</i>	
2	Rencana rata-rata kenaikan tarif	
3	Rencana peningkatan pelayanan	
4	Dst	

Catatan :

Dijelaskan implikasi masing-masing asumsi terhadap rencana kinerja, dapat berupa presentase, satuan, pertumbuhan, kenaikan/penurunan.

C. Sasaran Indikator, Target Kinerja dan Kegiatan Berdasarkan Unit Layanan

No	Unit Layanan ¹⁴	Sasaran ¹⁵	Indikator ¹⁶	Target ¹⁷	Kegiatan ¹⁸
1				
2				
3				
4				

Contoh/ilustrasi kegiatan pada BLUD untuk Rumah Sakit Daerah

No	Unit Layanan	Sasaran	Indikator	Target	Kegiatan
1	UGD	<i>Kemampuan penyelamatan jiwa</i>	Waktu tanggap pemeriksaan dokter (response time)	Maksimum 5 menit	Pelatihan, penambahan dokter yang telah terlatih
2	Rawat Inap	Meningkatnya mutu pelayanan	Pelayanan oleh dokter spesialis	100 %	Penambahan dokter spesialis dan alat medis yang memadai

¹⁴ Diisi jenis layanan yang ada

¹⁵ Diisi Sasaran dari jenis layanan yang ada

¹⁶ Diisi indikator pada Standar Pelayanan Minimal

¹⁷ Diisi target yang akan dicapai dalam Tahun Anggaran yang dianggarkan

¹⁸ Diisi kegiatan yang akan dilakukan pada tahun anggaran yang dianggarkan

D. Program Kerja dan Kegiatan

1. Program Kerja :

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

2. Kegiatan Pelayanan, terdiri dari :

- 1) Pelayanan
- 2) Pelayanan
- 3) Dst

E. Perkiraan Pendapatan

No	Sumber Pendapatan	Prognosa Tahun 20XX (Rp)	Proyeksi Tahun 20XX+1 (Rp)
	2	3	4
1	Jasa Layanan		
2	Hibah		
3	Kerjasama		
4	APBD		
5	APBN		
6	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah		
	Jumlah		

Uraian :

.....

F. Perkiraan Biaya

1. Biaya Berdasarkan Unit Layanan¹⁹

Program		: Peningkatan Kualitas Pelayanan		
Kegiatan		: Pelayanan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Input				
Output	1.			
	2.			
Outcome ²⁰			
Anggaran Biaya				
Komponen Biaya	Rincian Biaya			Jumlah Anggaran (Rp)
	Jumlah	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5 = (2X4)
I. Biaya Operasional				
A. Biaya Pelayanan				
1. Biaya pegawai				
.....				
.....				

¹⁹ opsional

²⁰ Dapat diisi dengan target terkait dengan Standar Pelayanan Minimal

2. Biaya bahan ²¹				
.....				
.....				
3. Biaya jasa pelayanan				
.....				
.....				
4. Biaya pemeliharaan				
.....				
.....				
5. Biaya barang dan jasa				
.....				
.....				
6. Biaya depresiasi				
.....				
.....				
7. Biaya pelayanan lainnya				
.....				
.....				
B. Biaya Umum dan Administrasi				
1. Biaya pegawai				
.....				
.....				
2. Biaya administrasi kantor				
.....				
.....				
3. Biaya pemeliharaan				
.....				
.....				
4. Biaya barang dan jasa				
.....				
.....				
5. Biaya promosi				
.....				
.....				
6. Biaya depresiasi				
.....				
.....				
7. Biaya umum dan administrasi lainnya				
II. Biaya Non Operasional				
1. Biaya bunga				
.....				
.....				
2. Biaya				

²¹ Termasuk harga pokok barang yang dijual

administrasi bank				
.....				
.....				
3. Kerugian pelepasan aset tetap				
.....				
.....				
4. Kerugian penurunan nilai				
.....				
.....				
5. Biaya non operasional lainnya				
.....				
.....				
Jumlah Biaya (I+II)				

Catatan:

Format ini dibuat untuk setiap jenis pelayanan

Dalam hal terdapat kesulitan untuk mengelompokkan biaya pada unit layanan, dapat menggunakan format sebagai berikut :

Komponen Biaya	Jumlah Anggaran (Rp)
1	2
I. Biaya Operasional	
A. Biaya Pelayanan	
1. Biaya pegawai	
2. Biaya bahan	
3. Biaya jasa pelayanan	
4. Biaya pemeliharaan	
5. Biaya barang dan jasa	
6. Biaya depresiasi dan amortisasi	
7. Biaya pelayanan lainnya	
B. Biaya Umum dan Administrasi	
1. Biaya pegawai	
2. Biaya administrasi kantor	
3. Biaya pemeliharaan	
4. Biaya barang dan jasa	
5. Biaya promosi	
6. Biaya depresiasi dan amortisasi	
7. Biaya umum dan administrasi lainnya	
II. Biaya Non Operasional	
1. Biaya bunga	
2. Biaya administrasi bank	
3. Kerugian pelepasan aset tetap	
4. Kerugian penurunan nilai	
5. Biaya non operasional lainnya	
Jumlah Biaya (I+II)	

2. Total Biaya Operasional dan Non Operasional

No	Biaya	Unit Layanan	Jumlah Biaya
1	2	3	4
A	Biaya Operasional		
	1. Biaya Pelayanan		
	2. Biaya Umum dan Administrasi		
B	Biaya Non Operasional		
	Total		

G. Perkiraan Penerimaan dan Pengeluaran Investasi

1. Penerimaan Investasi (Unit Layanan)²²

No	Komponen Penerimaan Investasi	Prognosa Tahun 20XX (Rp)	Anggaran Tahun 20XX (Rp)
1	2	3	4
	1. Pelepasan Aset		
	a. Kendaraan		
	b. Mesin		
	c. Dst		
	2. Pencairan Investasi		
	a. Pencairan deposito		
	b. Penjualan surat berharga		
	c. Dst		
	Jumlah		

Uraian :

.....

.....

.....

.....

2. Pengeluaran Investasi (Unit Layanan)²³

Komponen Pengeluaran Investasi	Rincian Pengeluaran			Jumlah Pengeluaran (Rp)
	Jumlah	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5 = (2X4)
1. Pembelian Tanah				
.....				
.....				
2. Pembelian peralatan dan mesin				
.....				
.....				
3. Pembangunan gedung dan bangunan				
.....				
.....				
4. Pembelian kendaraan				
.....				
.....				
5. Pembelian peralatan kantor				
.....				
.....				

²² Sesuai dengan investasi yang dilakukan

²³ Sesuai dengan investasi yang dilakukan

6. Pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan				
.....				
7. Pembelian surat berharga jangka panjang				
.....				
8. Pembangunan/ pengembangan sistem informasi				
.....				
9. Pembangunan/ pengembangan sarana fisik lainnya				
.....				
Jumlah Pengeluaran Investasi				

Uraian :

.....

.....

.....

.....

H. Perkiraan Penerimaan dan Pengeluaran Pendanaan

1. Penerimaan Pendanaan

No	Komponen Penerimaan Pendanaan	Prognosa Tahun 20XX (Rp)	Anggaran Tahun 20XX (Rp)
1	2	3	4
1	Penarikan Pinjaman dari		
2	Dst		
	Jumlah		

Uraian :

.....

.....

.....

2. Pengeluaran Pendanaan

Komponen Pengeluaran Pendanaan	Rincian Pengeluaran			Jumlah Pengeluaran (Rp)
	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5
1. Pengeluaran pembayaran hutang				
a. Pokok				
b. Bunga dan administrasi				
c. Komisi, provisi, denda				
2. Dst				
.....				
Jumlah				

Uraian :

.....

.....

.....

I. Anggaran Badan Layanan Umum Daerah

Anggaran BLUD merupakan penjabaran program dan kegiatan dalam satuan uang berdasarkan pendapatan, biaya, dan pengeluaran yang dananya bersumber dari seluruh pendapatan BLUD.

1. Anggaran Pendapatan (Basis Akrual)

Berdasarkan sumber pendapatan :

- (a) Jasa layanan;
- (b) Hibah;
- (c) Hasil kerjasama;
- (d) APBD;
- (e) APBN; dan
- (f) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Penyajian anggaran pendapatan BLUD, dengan format sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Berdasarkan Sumber Pendapatan

(dalam ribuan rupiah)

No	Uraian	Prognosa TA 20XX (Rp)	Anggaran TA 20XX+1 (Rp)	Perkiraan Maju TA 20XX+2 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
	2	3	4	5	6 = (4-3)/3
1	Pendapatan jasa layanan				
	a.				
	b.				
	c. Dst				
2	Hibah				
	a.				
	b.				
	c. Dst				
3	Hasil kerjasama				
	a. Hasil kerjasama dengan.....				
	b. Hasil kerjasama dengan.....				
	c. Dst ²⁴				
4	Pendapatan dari APBD				
	a. Operasional				
	b. Investasi				
	c. Dst				
5	Pendapatan dari APBN				
	a. Operasional				
	b. Investasi				
	c. Dst				
6	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah				
	a. Keuntungan penjualan aset				
	b. Hasil pemanfaatan kekayaan				
	c. Jasa giro/ bunga				
	d. Dividen				
	e. Dst				
	Jumlah				

²⁴ Dimungkinkan ada lampiran tersendiri

2. Anggaran Biaya (Basis Akrual)

a. Biaya Operasional BLUD, meliputi :

- 1) Biaya Pelayanan, terdiri dari :
 - (a) Biaya pegawai;
 - (b) Biaya bahan;
 - (c) Biaya jasa pelayanan;
 - (d) Biaya pemeliharaan;
 - (e) Biaya barang dan jasa;
 - (f) Biaya depresiasi; dan
 - (g) Biaya pelayanan lain-lain.
- 2) Biaya umum dan administrasi, terdiri dari :
 - (a) Biaya pegawai;
 - (b) Biaya administrasi kantor;
 - (c) Biaya pemeliharaan;
 - (d) Biaya barang dan jasa;
 - (e) Biaya promosi;
 - (f) Biaya depresiasi dan
 - (g) Biaya umum dan administrasi lainnya.

b. Biaya Non Operasional, Meliputi :

- 1) Biaya bunga;
- 2) Biaya administrasi bank;
- 3) Kerugian pelepasan aset;
- 4) Kerugian penurunan nilai; dan
- 5) Biaya non operasional lainnya.

Penyajian anggaran biaya BLUD dilakukan dengan format sebagai berikut :

1. Anggaran Biaya Badan Layanan Umum Daerah Berdasarkan Sumber Dana Tahun Anggaran (20XX+1)

No	Komponen Biaya	Sumber Dana Tahun Anggaran (20XX+1)						Jumlah
		Jasa layanan	Hibah	Kerjasama	APBD	APBN	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	BIAYA OPERASIONAL							
A	Biaya Pelayanan							
1	Biaya pegawai							
							
							
2	Biaya bahan							
							
							
3	Biaya jasa pelayanan							
							
							
4	Biaya pemeliharaan							
							
							
5	Biaya barang dan jasa							
							
							
6	Biaya depresiasi							
							
							
7	Biaya pelayanan lainnya							
							
							
B	Biaya Umum dan Administrasi							
1	Biaya pegawai							
							
							
2	Biaya administrasi kantor							
							
							
3	Biaya pemeliharaan							
							
							
4	Biaya barang dan jasa							

							
							
5	Biaya promosi							
							
							
6	Biaya depresiasi							
							
							
7	Biaya umum dan administrasi lainnya							
							
							
II	BIAYA NON OPERASIONAL							
1	Biaya bunga							
							
							
2	Biaya administrasi bank							
							
							
							
3	Kerugian pelepasan aset tetap							
							
							
4	Kerugian penurunan nilai							
							
							
5	Biaya non operasional lainnya							
							
							
	Jumlah							

2. Anggaran Biaya Badan Layanan Umum Daerah Berdasarkan Jenis Belanja Tahun (20XX+1)

No	Jenis Biaya	Jenis Belanja			Total Biaya
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	
1	2	3	4	5	6
I	BIAYA OPERASIONAL				
A	Biaya Pelayanan				
1	Biaya pegawai				
2	Biaya bahan				
3	Biaya jasa pelayanan				
4	Biaya pemeliharaan				
5	Biaya barang dan jasa				
6	Biaya depresiasi				
7	Biaya pelayanan lainnya				
B	Biaya Umum dan Administrasi				
1	Biaya pegawai				
2	Biaya administrasi kantor				
3	Biaya pemeliharaan				
4	Biaya barang dan jasa				
5	Biaya promosi				
6	Biaya depresiasi				
7	Biaya umum dan administrasi lainnya				
II	BIAYA NON OPERASIONAL				

1	Biaya bunga				
				
				
2	Biaya administrasi bank				
				
				
3	Kerugian pelepasan aset tetap				
				
				
4	Kerugian penurunan nilai				
				
				
5	Biaya non operasional lainnya				
				
				
	Jumlah				

3. Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (Basis Kas)

a. Pendapatan yang diterima dari :

- Umum
- Asumsi / penjaminan
- Pemerintah daerah
- Pemerintah
- Dst

b. Pendapatan hasil kerjasama

- Kerjasama dengan
- Kerjasama dengan
- Dst

c. Pendaptan hibah

- Hibah dari.....
- Hibah dari.....
- Dst

d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah

- Bunga dari
- Sewa dari
- Dst

**Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah
(Basis Kas)
(Tahun Anggaran 20XX+)**

No	Uraian	Prognosa TA 20XX (Rp)	Anggaran TA 20XX+1 (Rp)	Perkiraan Maju TA 20XX+2 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (%)
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan jasa layanan				
	a. Umum				
	b. Asuransi / penjaminan				
	c. Pemerintahan daerah				
	d. Pemerintah				
	e. Dst				
2	Pendapatan hasil kerjasama				
	a. Kerjasama dengan				
	b. Kerjasama dengan				
	c. Dst				
3	Pendapatan hibah				
	a. Hibah dari				
	b. Hibah dari				
	c. Dst				
4	Lain-lain pendapatan BLUD yang sah				
	a. Bunga dari				
	b. Sewa dari				
	c. Dst				
	Jumlah				

4. Anggaran Belanja Badan Layanan Umum Daerah (Basis Kas)

Belanja Operasional, meliputi :

- a. Pembayaran kepada pegawai;
- b. Pembayaran kepada pihak ketiga;
- c. Pembayaran lainnya;

**Format Anggaran Belanja Badan Layanan Umum Daerah Berdasarkan Sumber Dana (Basis Kas)
Tahun Anggaran (20XX+1)**

No	Komponen Biaya	Sumber Dana Tahun Anggaran 20XX+1						Jumlah
		Jasa Layanan	Hibah	Kerjasama	APBD	APBN	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pembayaran kepada pegawai							
2	Pembayaran kepada pihak ketiga							
3	Pembayaran lain-lain							

5. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Investasi

a. Penerimaan Investasi

- 1) Pelepasan aset, antara lain :
 - Kendaraan
 - Mesin
 - Dst
- 2) Pencairan Investasi, antara lain :
 - Pencairan deposito
 - Penjualan surat berharga
 - Dst

**Format Anggaran Penerimaan Investasi Badan Layanan Umum Daerah
(Basis Kas)
Tahun Anggaran 20XX+1**

No	Uraian	Prognosa 2017 (Rp)	Proyeksi Tahun Anggaran 2018 (Rp)	Perkiraan Maju 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (%)
1	2	3	4	5	6
1	Pelepasan aset				
	a. Kendaraan				
	b. Mesin				
	c. Dst				
2	Pencairan investasi				
	a. Pencairan deposito				
	b. Penjualan surat berharga				
	c. Dst				

b. Pengeluaran Investasi (Belanja Modal), meliputi :

- 1) Perolehan tanah;
- 2) Perolehan peralatan dan mesin;
- 3) Perolehan gedung dan bangunan;
- 4) Perolehan kendaraan;
- 5) Perolehan perlengkapan dan peralatan kantor;
- 6) Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan;
- 7) Pengeluaran pembelian surat berharga jangka panjang;
- 8) Pengeluaran pembangunan / pengembangan sistem informasi; dan
- 9) Pengeluaran pembangunan / pengembangan sarana fisik lainnya.

**Format Anggaran Pengeluaran Investasi Badan Layanan Umum Daerah
Berdasarkan Sumber Dana (Basis Kas)
Tahun Anggaran (20XX+1)**

No	Komponen Biaya	Sumber Dana Tahun Anggaran 2018							Jumlah
		Jasa Layanan	Hibah	Kerjasama	APBD	APBN	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Perolehan tanah								
2	Perolehan peralatan dan mesin								
3	Perolehan gedung dan bangunan								
4	Perolehan kendaraan								
5	Perolehan perlengkapan dan peralatan kantor								
6	Peolehan jalan, irigasi, dan jaringan								
7	Pengeluaran pembelian surat berharga jangka panjang								

8	Pengeluaran pembangunan/pengembangan sistem informasi									
									
9	Pengeluaran pembangunan/pengembangan sarana fisik lainnya									
									

c. Anggaran Pengeluaran Investasi Badan Layanan Umum Daerah Berdasarkan Jenis Belanja dan Jenis Pembiayaan

No	Komponen Biaya	Jenis Belanja			Total Biaya
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	
1	2	3	4	5	6
1	Perolehan tanah				
2	Perolehan peralatan dan mesin				
3	Perolehan gedung dan bangunan				
4	Perolehan kendaraan				
5	Perolehan perlengkapan dan peralatan kantor				
6	Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan				
7	Pengeluaran pembelian surat berharga jangka panjang				
8	Pengeluaran pembangunan/pengembangan sistem informasi				
9	Pengeluaran pembangunan/pengembangan sarana fisik lainnya				

6. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pendanaan

a. Penerimaan Pendanaan, meliputi :

- 1) Penarikan pinjaman dari
- 2) Dst

b. Pengeluaran untuk Pendanaan, meliputi :

- 1) Pembayaran pinjaman;
- 2) Dst

**a. Format Anggaran Penerimaan Pendanaan Badan Layanan Umum Daerah
Tahun Anggaran (20XX+1)**

No	Uraian	Prognosa 20XX (Rp)	Proyeksi TA 20XX+1 (Rp)	Perkiraan Maju TA 20XX+2 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	2	3	4	5	6
1	Penarikan pinjaman dari				
2	Dst				

b. Format Anggaran Pengeluaran Pendanaan Badan Layanan Umum Daerah Berdasarkan Sumber Dana (20XX+1)

No	Komponen Biaya	Sumber Dana Tahun Anggaran 20XX+1						Jumlah
		Jasa Layanan	Hibah	Kerjasama	APBD	APBN	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pembayaran Pinjaman							
	a. Pokok							
	b. Bunga dan administrasi							
	c. Provisi, denda							
2	Dst							

c. Anggaran Pengeluaran Pendanaan Badan Layanan Umum Daerah Berdasarkan Jenis Belanja dan Jenis Pembiayaan

No	Jenis Pengeluaran	Jenis Anggaran			Jenis Pembiayaan		Total Biaya
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Penerimaan Pembiayaan	Pengeluaran Pembiayaan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pembayaran Pinjaman						
	a. Pokok						
	b. Bunga dan administrasi						
	c. Komisi, provisi, denda						
2	Dst						
	JUMLAH						

J. Ambang Batas Rencana Bisnis dan Anggaran

Besaran ambang batas dalam RBA ini adalah% dari biaya yang bersumber dari pendapatan jasa layanan.

BAB IV
PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 20XX+1

A. NERACA

NERACA
PROYEKSI PER 31 DESEMBER 20XX+1

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Prognosa per 31 Desember TA Berjalan (Rp)	Proyeksi per 31 Desember 20XX+1 (Rp)	Perubahan	
			Jml (Rp)	%
1	2	3	4	5
I. ASET				
A. Aset Lancar				
1. Kas dan setara kas				
2. Investasi jangka pendek				
3. Piutang usaha				
4. Piutang lain-lain				
5. Persediaan				
6. Uang muka				
7. Pendatana yang masih harus diterima				
8. Dst				
Jumlah Aset Lancar				
B. Investasi Jangka Panjang				
C. Aset Tetap				
1. Tanah				
2. Peralatan dan mesin				
3. Gedung dan bangunan				
4. Kendaraan				
5. Perlengkapan dan peralatan kantor				
6. Jalan, irigasi, dan jaringan				
7. Dst				
Jumlah Aset Tetap				
Akumulasi Penyusutan				
Nilai Buku Aset Tetap				
D. Aset Lain-lain				
1. Aset tak berwujud				
2. Konstruksi dalam pengerjaan				
3. Dst				
Jumlah Aset Lain-lain				
Jumlah Aset (A+B+C+D)				
II. KEWAJIBAN				
A. Kewajiban Jangka Pendek				
1. Utang usaha				
2. Utang pajak				
3. Biaya yang masih harus dibayar				
4. Utang jangka panjang				
5. Pendapatan yang				

diterima dimuka				
6. Dst				
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek				
B. Kewajiban Jangka Panjang				
1. Utang jangka panjang				
2. Dst				
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang				
Jumlah Kewajiban (A+B)				
III. EKUITAS				
1. Ekuitas tidak terikat				
a. Ekuitas awal				
b. Surplus (Defisit) s.d periode tahun lalu				
c. Surplus (Defisit) tahun berjalan				
2. Terikat permanen ¹				
3. Terikat temporer ²				
4. Hibah ³				
5. Donasi				
6. Dst				
Jumlah Ekuitas				
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas (II+III)				

¹Seperti : APBD untuk investasi

² Seperti : APBD utk gaji, operasional

³ Hibah merupakan pemberian yang berasal dari pemerintah/ pemerintah daerah lain

B. Laporan Operasional

**LAPORAN OPERASIONAL
PROYEKSI TAHUN ANGGARAN 20XX+1**

(dalam ribuan rupiah)

Komponen	Prognosa TA Berjalan (Rp)	Proyeksi TA 20XX+1 (Rp)	Perubahan	
			Jml (Rp)	%
1	2	3	4	5
A. Pendapatan				
1. Jasa layanan				
2. Hibah				
3. Hasil kerjasama				
4. Pendapatan dari APBD				
5. Pendapatan dari APBN				
6. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah				
Jumlah Pendapatan (1+2+3+4+5+6)				
B. Biaya Operasional				
1. Biaya pelayanan				
2. Biaya umum dan administrasi				
Jumlah Biaya Operasional (1+2)				
Surplus (Defisit) setelah biaya operasional (A-B)				
C. Pendapatan Non Operasional				
D. Biaya Non Operasional				
Surplus (Defisit) sebelum pos keuntungan / kerugian				
Surplus (Defisit) sebelum pos-pos luar biasa				
1. Pendapatan dari kejadian luar biasa				
2. Biaya dari kejadian luar biasa				
Surplus (Defisit) bersih tahun Berjalan				

C. Laporan Arus Kas
1. Metode Langsung

LAPORAN ARUS KAS
PROYEKSI TAHUN 20XX+1

(dalam ribuan rupiah)

Komponen	Prognosa TA Berjalan (Rp)	Proyeksi TA 20XX+1 (Rp)	Perubahan	
			Jml (Rp)	%
1	2	3	4	5
A. Arus Kas dari Aktivitas Operasional				
Arus Kas Masuk				
1. Jasa layanan				
2. Hibah				
3. Hasil kerjasama				
4. Pendapatan dari APBD				
5. Pendapatan dari APBN				
6. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah				
Arus Kas Keluar				
1. Biaya layanan				
2. Biaya umum dan administrasi				
3. Biaya lain-lain				
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional				
B. Arus Kas dari Aktivitas Investasi				
Arus Kas Masuk				
1. Hasil penjualan aset tidak lancar ²⁶				
2. Hasil investasi				
3. Dst				
Arus Kas Keluar				
1. Perolehan aset tetap				
2. Pembelian investasi				
3. Dst				
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi				
C. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan				
Arus Kas Masuk				
1. Penerimaan pinjaman				
2. Dst				
Arus Kas Keluar				
1. Pembayaran pinjaman				
2. Dst				
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan				
Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih				
Kas dan Setara Kas Awal				
Kas dan Setara Kas Akhir				

²⁶ Termasuk di dalamnya investasi jangka panjang (surat utang atau surat ekuitas/ saham)

2. Metode Tidak Langsung

LAPORAN ARUS KAS PROYEKSI TAHUN 20XX+1

(dalam ribuan rupiah)

Komponen	Prognosa TA Berjalan (Rp)	Proyeksi TA 20XX+1 (Rp)	Perubahan	
			Jml (Rp)	%
1	2	3	4	5
A. Arus Kas dari Aktivitas Operasional				
1. Surplus (Defisit) tahun berjalan				
2. Penyesuaian ke dasar kas				
a. Biaya penyusutan dan amortisasi				
b. Kerugian penurunan nilai				
c. Biaya bunga				
d. Dst				
3. Perubahan aset lancar				
a. Investasi jangka pendek				
b. Piutang usaha				
c. Piutang lain-lain				
d. Persediaan				
e. Uang muka				
f. Pendapatan yang masih harus diterima				
4. Perubahan kewajiban jangka pendek				
a. Utang usaha				
b. Utang pajak				
c. Biaya yang masih harus dibayar				
d. Utang jangka panjang yang jatuh dalam satu tahun				
e. Pendapatan yang diterima di muka				
f. Utang jangka pendek lainnya				
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional				
B. Arus Kas dari Aktivitas Investasi				
Arus Kas Masuk				
1. Hasil penjualan aset tidak lancar				
2. Hasil investasi				
3. Dst				
Arus Kas Keluar				
1. Perolehan aset tetap				
2. Pembelian investasi				
3. Perolehan aset lainnya				
4. Dst				
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi				
C. Arus Kas dari Aktivitas				

Pendanaan				
Arus Kas Masuk				
1. Penerimaan pinjaman				
2. Dst				
Arus Kas Keluar				
1. Pembayaran pinjaman				
2. Dst				
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan				
Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih				
Kas dan Setara Kas Awal				
Kas dan Setara Kas Akhir				

D. Catatan atas Proyeksi Laporan Keuangan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Proyeksi Tanggal 31 Desember 20XX+1 dan Periode Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 20XX+1

a. Penjelasan Atas Informasi-informasi Keuangan

1) Kas dan Setara Kas, terdiri dari :

Uraian	Prognosa per 31 Desember TA Berjalan (Rp)	Proyeksi TA 20XX+1 (Rp)
1	2	3
Kas di bendahara penerimaan		
Kas di bendahara pengeluaran		
Giro Bank		
Giro Bank		
Tabungan Bank		
Tabungan Bank		
Deposito Bank		
Deposito Bank		
Jumlah		

2) Piutang Usaha, terdiri dari :

Uraian	Prognosa per 31 Desember TA Berjalan (Rp)	Proyeksi TA 20XX+1 (Rp)
1	2	3
Piutang kepada		
Piutang kepada		
Jumlah		

3) Dst

b. Penjelasan Atas Informasi Lainnya

.....
.....
.....
.....
.....

BAB V
PENUTUP

A. Hal- hal Yang Perlu mendapat Perhatian dalam Implementasi Kegiatan Badan,Layanan Umum Daerah

.....
.....
.....
.....
.....
.....

B. Kesimpulan

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....,.....20XX

BLUD.....

Pemimpin BLUD

(.....)

IV. KONVERSI RBA-BLUD KEDALAM STRUKTUR RAPBD

Untuk keperluan integrasi/konsolidasi, seluruh sumber dan alokasi biaya pada RBA BLUD dikonversi sesuai dengan kelompok dan jenis belanja kedalam struktur RAPBD dan dicantumkan dalam dokumen RBA, sebagai berikut:

1. Pendapatan BLUD ke dalam Pendapatan APBD

NO	Sumber Pendapatan BLUD	Pendapatan Asli Daerah				Jumlah
		Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Lain-lain PAD Yang sah	
1	2	3	4	5	6	7
1	Jasa Layanan				XXX	XXX
2	Hibah				XXX	XXX
3	Kerja sama				XXX	XXX
4	Lain - lain pendapatan BLUD				XXX	XXX
	Total				XXX	XXX

2. Biaya BLUD dalam Belanja

NO		Jenis Belanja dalam APBD			
		Belanja Langsung			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
I.	BIAYA OPERASIONAL				
A.	BIAYA PELAYANAN				
	1. Biaya Pegawai	XXX			
	2. Biaya Bahan		XXX		
	3. Biaya Jasa Pelayanan		XXX		
	4. Biaya Pemeliharaan		XXX		
	5. Biaya Barang dan Jasa		XXX		
	6. Biaya Pelayanan Lainnya		XXX		
B.	BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI				
	1. Biaya Pegawai	XXX			
	2. Biaya Administrasi kantor		XXX		
	3. Biaya Pemeliharaan		XXX		
	4. Biaya Barang dan Jasa		XXX		
	5. Biaya Promosi		XXX		
	6. Biaya Umum dan Administ. lainnya		XXX		
II.	BIAYA NON OPERASIONAL				
	1. Biaya Bunga		XXX		
	2. Biaya Administrasi Bank		XXX		
	3. Kerugian Penjualan Aset		XXX		
	4. Kerugian Penurunan Nilai		XXX		
	5. Biaya Non Operasional		XXX		

3. Penerimaan Investasi ke dalam Pendapatan APBD

NO	Pendapatan Asli Daerah				
	Jenis Penerimaan	Pajak	Retribusi	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Lain-lain PAD Yang sah
1	2	3	4	5	
1.	Penjualan tanah				XXX
				
2.	Penjualan gedung				XXX
				
3.	Penjualan peralatan dan mesin				XXX
				
4.	Penjualan kendaraan				XXX
				
5.	Penjualan Peralatan Kantor				XXX
				
6.	Penjualan Surat Berharga				XXX
				
7.	Penjualan sarana Fisik lainnya				XXX
				
9.	Dst.....				XXX
	Total				XXXX

4. Pengeluaran Investasi ke dalam Belanja APBD

NO	Jenis Pengeluaran	Jenis Anggaran		
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal
1	2	3	4	5
1.	Pembelian tanah		XXX	XXX
			
2.	Pembelian gedung		XXX	XXX
			
3.	Pembelian peralatan dan mesin		XXX	XXX
			
4.	Pembelian kendaraan		XXX	XXX
			
5.	Pembelian Peralatan Kantor		XXX	XXX
			
6.	Pembangunan Jalan irigasi dan		XXX	XXX
			
7.	Pembelian Surat Berharga		XXX	XXX
			
8.	Pembangunan/pengembangan		XXX	XXX
			
9.	Pembelian sarana Fisik lainnya		XXX	XXX
			
10.	Dst.....		XXX	XXX
	Total		XXXX	XXXX

5. Penerimaan Pendanaan BLUD ka dalam Pembiayaan APBD

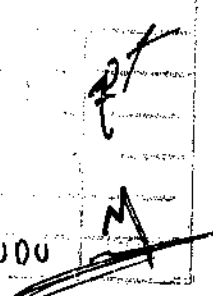
NO	Penerimaan Pendanaan	Pembiayaan dalam APBD		Jumlah
		Penerimaan Pembiayaan	Pengeluaran Pembiayaan	
1	2	3	4	5
1.	Penerimaan Pinjaman	xxx		xxx
	dari			
2.	Penerimaan Pinjaman	xxx		xxx
	dari			
3.	Penerimaan Pinjaman	xxx		xxx
	dari			
4.	Penerimaan Pinjaman	xxx		xxx
	dari			
5.	Penerimaan Pinjaman	xxx		xxx
	dari			
6.	Penerimaan Pinjaman	xxx		xxx
	dari			
7.	Dst.....	xxx		xxx
	Total	xxx		xxx

6. Pengeluaran Pendanaan BLUD ke dalam Pembiayaan APBD

NO	Penerimaan Pendanaan	Pembiayaan dalam		Jumlah
		Penerimaan Pembiayaan	Pengeluaran Pembiayaan	
1	2	3	4	5
1.	Pengeluaran Pembayaran Pinjaman		xxx	xxx
	a. Pokok Pinjaman Kepada		xxx	xxx
	b. Pokok Pinjaman Kepada		xxx	xxx
2.	Pengeluaran Pembayaran Pinjaman		xxx	xxx
	a. Pokok Pinjaman Kepada		xxx	xxx
	b. Pokok Pinjaman Kepada		xxx	xxx
3.	Pengeluaran Pembayaran Pinjaman		xxx	xxx
	a. Pokok Pinjaman Kepada		xxx	xxx
	b. Pokok Pinjaman Kepada		xxx	xxx
4.	Pengeluaran Pembayaran		xxx	xxx
	a. Pokok Pinjaman Kepada		xxx	xxx
	b. Pokok Pinjaman Kepada		xxx	xxx
5.	Pengeluaran Pembayaran Pinjaman		xxx	xxx
	a. Pokok Pinjaman Kepada		xxx	xxx
	b. Pokok Pinjaman Kepada		xxx	xxx
6.	Dst.....			
	Total		xxx	xxx

7. Pencantuman pendapatan Badan Layanan Umum Daerah dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kode Rekening													Uraian	Jumlah	Penjelasan
1													2	3	4
x	x	x	x	x	x	x	x	4					Pendapatan Daerah		
x	x	x	x	x	x	x	x	4	1				Pendapatan Asli Daerah		
x	x	x	x	x	x	x	x	4	1	4			Lain-lain PAD yang sah		
x	x	x	x	x	x	x	x	4	1	4	x		Pendapatan BLUD		
x	x	x	x	x	x	x	x	4	1	4	x	1	Pendapatan BLUD.....		
													a. Jasa Layanan		
													b. Hibah		
													c. Kerjasama		
													d. Lain - lain		
													Pendapatan BLUD yang sah		
x	x	x	x	x	x	x	x	4	1	4	x	1	Pendapatan BLUD.....		
													a. Jasa Layanan		
													b. Hibah		
													c. Kerjasama		
													d. Lain - lain		
													Pendapatan BLUD yang sah		



 PET. DIR. RSD RYACUDU

BUPATI LAMPUNG UTARA,

AGUNG ALMU MANGKUNEGARA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA

NOMOR : 47 2017

TANGGAL : 17 - 10 - 2017

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (RBA-BLUD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

I. FORMAT DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SKPD/UNIT KERJA.....					DPA-BLUD
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BIAYA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH					
	Uraian				Jumlah (Rp)
1	2				3
A PENDAPATAN BLUD					
	1. Jasa Layanan				
	2. Hibah				
	3. Hasil Kerjasama dengan pihak lain				
	4. APBD				
	5. APBN				
	6. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah				
	Jumlah				
B BIAYA BLUD					
	1. Biaya Operasional				
	2. Biaya Non Operasional				
	3. Pengeluaran Investasi				
	4. Pengeluaran Aset Tetap				
	5. Pengeluaran Pembiayaan				
	Jumlah				
	Surplus (Defisit)				
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TIAP TRIWULAN					
	Triwulan				Jumlah
	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	2+3+4+5
A. Pendapatan					
B. Biaya					
Tempat/tanggal/bulan/tahun Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nama/NIP					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SKPD/UNIT KERJA.....			DPA-BLUD
PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 20XX			
NO	SUMBER PENDAPATAN	PROGNOSA TH 20XX-(1) (Rp)	TARGET TH 20XX (Rp)
1	2	3	4
1	Jasa Layanan		
2	Hibah		
3	Kerja sama		
4	APBD		
5	APBN		
6	Lain - lain pendapatan BLUD yang sah		
	Jumlah		
<p>Tempat/tanggal/bulan/tahun Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah</p> <p>Nama/NIP</p>			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SKPD/UNIT KERJA		DPA-BLUD
BIAYA BLUD TAHUN ANGGARAN		
NO	ALOKASI BIAYA	JUMLAH
1	2	3
I	BIAYA OPERASIONAL	
	A. BIAYA PELAYANAN	
	1. Biaya Pegawai	
	2. Biaya Bahan	
	3. Biaya Jasa Pelayanan	
	4. Biaya Pemeliharaan	
	5. Biaya Barang dan Jasa	
	6. Biaya Pelayanan lainnya	
	Jumlah	
	B. BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI	
	1. Biaya Pegawai	
	2. Biaya Administrasi kantor	
	3. Biaya Pemeliharaan	
	4. Biaya Barang dan Jasa	
	5. Biaya Promosi	
	6. Biaya Umum dan Administ. lainnya	
	Jumlah	
II	BIAYA NON OPERASIONAL	
	1. Biaya Bunga	
	2. Biaya Administrasi Bank	
	3. Kerugian Penjualan Aset Tetap	
	4. Kerugian Penurunan Nilai	
	5. Biaya Non Operasional Lainnya	
	Jumlah	
III	BIAYA PENGELUARAN INVESTASI	
	1. Pembelian surat Berharga	
	2. Pengeluaran Pembelian Tanah	
	3. Pengeluaran Pembelian Gedung	
	4. Pengeluaran untuk Peralatan dan Mesin	
	5. Pengeluaran Sarana Fisik Lainnya	
	Jumlah	
IV	PENGELUARAN PENDANAAN	
	1. Pembayaran Pokok Hutang	
	2. Pembayaran Eunga	
	3. Pembayaran Administrasi, Komisi, Provisi, Denda	
	Jumlah	
	TOTAL	
Tempat/tanggal/bulan/tahun Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nama/NIP		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SKPD/UNIT KERJA			DPA-BLUD	
SKPD/UNIT KERJA				
PROYEKSI ARUS KAS TAHUN				
NO	ALOKASI BIAYA			
1	2	3	4	5
I.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL			
II.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
III.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
	Kenaikan (Penurunan) Bersih			
	Kas dan Setara Kas Awal			
	Jumlah Saldo Kas			
<p>Tempat/tanggal/bulan/tahun Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah</p> <p>Nama/NIP</p>				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SKPD/UNIT KERJA				DPA-BLUD
PROGRAM : 1. Peningkatan Pelayanan BLUD				
KEGIATAN : 1. Pelayanan Kesehatan				
INDIKATOR	TOLAK UKUR KINERJA			TARGET KINERJA
INPUT				
OUTPUT				
OUTCOME				
ANGGARAN BELANJA				
Komponen Biaya	Rincian Biaya (Satuan Harga)			Jumlah
	Jml	Satuan	Harga satuan	
I BIAYA OPERASIONAL				
A BIAYA PELAYANAN				
1. Biaya Pegawai				
2. Biaya Bahan				
3. Biaya Jasa Pelayanan				
4. Biaya Pemeliharaan				
5. Biaya Barang dan Jasa				
6. Biaya Pelayanan lainnya				
Jumlah				
B BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI				
1. Biaya Pegawai				
2. Biaya Administrasi kantor				
3. Biaya Pemeliharaan				
4. Biaya Barang dan Jasa				
5. Biaya Promosi				
6. Biaya Umum dan Administ. lainnya				
Jumlah				
II BIAYA NON OPERASIONAL				
1. Biaya Bunga				
2. Biaya Administrasi Bank				
3. Kerugian Penjualan Aset Tetap				
4. Kerugian Penurunan Nilai				
5. Biaya Non Operasional Lainnya				
Jumlah				
III PENGELUARAN INVESTASI				
1. Pengeluaran Pembelian Tanah				
2. Pengeluaran Pembelian Gedung				
3. Pengeluaran Peralatan dan Mesin				
Jumlah				
IV PENGELUARAN PENDANAAN				
1. Pembayaran Pokok Hutang				
2. Pembayaran Bunga				
3. Pembayaran Administrasi, Komisi, Provisi, Denda				
Jumlah				
TOTAL				
Tempat/tanggal/bulan/tahun Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nama/NIP				

PERJANJIAN KINERJA

NOMOR : _____

NOMOR :

TENTANG

PENINGKATAN KINERJA (Nama BLUD OPD/Unit Kerja) KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 20XX

Pada hari ini, tanggal bulan tahun ,
dibuat dan ditandatangani perjanjian kinerja oleh dan antara pihak-pihak yang
bertanda tangan dibawah ini:

1. (Nama Bupati atau yang mewakili) : Dalam jabatannya sebagai Bupati Lampung Utara, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, berkedudukan di (Alamat), selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. (Nama Pimpinan BLUD OPD/Unit Kerja) : Dalam jabatannya sebagai Pemimpin BLUD (Nama BLUD OPD/Unit Kerja), dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama dari (Nama BLUD OPD/Unit Kerja), berkedudukan di (Alamat), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** masing-masing menjalankan jabatannya sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatannya, dalam rangka peningkatan pelayanan pada (Nama BLUD OPD/Unit Kerja). **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengadakan Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) **PIHAK KEDUA** bertugas dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan kegiatan untuk meningkatkan Kinerja Pelayanan BLUD dan pengelolaan dana sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Badan Layanan Umum Daerah (Nama BLUD OPD/Unit Kerja) Tahun Anggaran 20XX.
- (2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Badan Layanan Umum Daerah (Nama BLUD OPD/Unit Kerja) dimaksud pada ayat (1) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kinerja ini.

Pasal 2

Dalam keadaan tertentu, **PIHAK KEDUA** dapat melakukan Pengeluaran Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (Nama BLUD OPD/Unit Kerja) dengan Ambang Batas pengeluaran maksimal sebesar% yang bersumber dari pendapatan Jasa Layanan (Nama BLUD OPD/Unit Kerja) Tahun Anggaran 20XX.

Pasal 3

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, **PIHAK KEDUA** menyatakan kesanggupan untuk:

- a. Meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- b. Meningkatkan kinerja keuangan.
- c. Meningkatkan kinerja manfaat bagi masyarakat.

Pasal 4

PIHAK KESATU akan melakukan evaluasi kinerja terhadap kesanggupan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

(Nama)

(Nama)

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

PLT. DIR. RSD. RYACUDU

BUPATI LAMPUNG UTARA,

AGUNG ILMU MANGKUNEGARA